

**DAFTAR BACAAN**

**BUKU**

- Ben, Terra, *Sales Taxation, The Case of Value Added Tax in The European Community*, Kluwer Law and Taxation Publisher, Deventer, 1988.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Djajadiningrat, S.I. *Asas dan Dasar perpajakan*, Eresco, Bandung, 2014.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Irwansyah, Lubis, Abidah Sari Lubis, *Taat hukum Pajak*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Cetakan Ke-13 Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Nasucha, Chaizi, *Reformasi Administrasi Publik (Teori dan Praktik)*, Gramedia, Jakarta, 2004.
- Negara, Tunggal Anshara Setia, *Ilmu Hukum Pajak*, Setara Press, Malang, 2017
- Pohan, Anwar, *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Wirawan Ilyas, Richard Burton, *Hukum Pajak (Teori, analisis, dan perkembangannya)*, Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta 2012.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Bogor, 2005.

Sukardji, Untung, *Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Sutrisno, Deddy, Indrawati, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014.

Winataputra, S. Udin, Dasim Budimansyah, *Materi Kesadaran Pajak Untuk Perguruan Tinggi*, Tim Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, 2016.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.03/2015 Tentang Penunjukan Badan Usaha Tertentu Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya. (Berita Negara Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 345)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234 /Pmk.01/ 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 1926)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/Pmk.09/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/Pmk.09/2008 Tentang Komite Pengawas Perpajakan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 636)

Peraturan Bank Indonesia 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6203).

## INTERNET

Devitasari Ratna Septi Aningtiyas, “Sistem Penagihan Pajak”  
<https://www.pajak.go.id/artikel/penagihan-pajak-menyeramkan>, dikunjungi tanggal 4 Desember 2019.

Dian Kurniati, “Ternyata Ini Alasan Pajak Transaksi Elektronik Diatur di Perpu 1/2020  
[www.news.ddtc.co.id/ternyata-ini-alasan-pajak-transaksi-elektronik-diatur-di-perppu-1-2020-19940](http://www.news.ddtc.co.id/ternyata-ini-alasan-pajak-transaksi-elektronik-diatur-di-perppu-1-2020-19940) dikunjungi tanggal 6 Juni 2020.

Jimly Asshidiqie, “Penegakan Hukum”  
[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) dikunjungi tanggal 19 November 2019.

Fajarizki Galuh Syahbana Yunus, “Urgensi Pemajakan Dompot Digital”  
<https://news.ddtc.co.id/urgensi-pemajakan-dompot-digital-20247/>, dikunjungi tanggal 22 Juni 2020

“Pengertian Fintech”  
<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx> , dikunjungi tanggal 10 oktober 2019.

Rani Maulida, “Mekanisme Pemungut PPN”  
<https://www.online-pajak.com/mekanisme-pemungutan-ppn> , dikunjungi 18 tanggal Mei 2020.

**JURNAL**

- Andromedha Daud dan Harijanto Sabijono, '*Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Nenggapratama Internusantara*', Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, Manado, Vol.3, No. 2. 2018.
- Chandra Dewi Puspitasari , '*Mendorong Tingkat Kepatuhan Pajak Melalui Penegakan Hukum Terhadap Aparat Pajak*', Jurnal Civics, Yogyakarta, Vol.2 No.2, 2005.
- Iwan Suhardi , '*Penyatuan Hukum Pajak Formal Dalam Sistem Hukum Pajak Nasional*' , Yuridika, Surabaya, Vol. 31, No. 1, 2016.
- Kirana Widyastuti, '*Tantangan Dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik Di Indonesia: Studi Kasus Pt Xyz*', Jurnal Sistem Informasi, Jakarta, Vol. 13, No. 1, 2017.
- Michael Meehan, '*Virtual Property : Property Bits in Context*', Journal of Law & Technology", Virginia, Vol. 13, No. 3, 2006.
- Mintarsih, '*Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*', Jurnal Wawasan Hukum, Bandung Vol. 29 No. 02, 2013.
- Nindyo Pramono, '*Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-Commmerce dan E-Business: Bagaimana Solusi Hukumnya*', Jurnal Hukum, Jakarta, Vol. 8, No. 16, 2001.
- Novi Darmayanti, '*Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Cv. Sarana Teknik Kontrol Surabaya*', Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Lamongan, Vol. 1, No. 3, 2012.
- Philipus M. Hadjon, '*Tentang Wewenang*', Yuridika, Surabaya, Vol. 7, No. 5-6, 1997.
- Ria Safitri, Heni Siswanto, Dona Raisa Monica , '*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Perambahan Nilai (PPN)*' , Jurnal Bagian Hukum Pidana, Lampung, Vol. 5, No. 4, 2017.
- Rifqy Tazkiyyaturrohmah, '*Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern*', Jurnal Muslim Heritage, Semarang, Vol. 3, No. 1, 2018.

Sofyeti Misman, '*Pengaruh Penerapan Sistem Self Assessment Terhadap Optimalisasi Penerimaan Pph Pasal 25 Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Manado*', Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Manado, Vol. 16, No. 04, 2016.

Suharni, '*Uang Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Perubahan Sosial*', Jurnal Spektrum Hukum, Semarang, Vol.5, No.1, 2018.

Susan H. Abramovich dan David L Cummings, '*Virtual Property, Real Law: The Regulation of Property in Video Games*', Canadian Journal of Law and Technology, Vol 6, No.2, 2007.